



## DYNAMICS OF FOREIGN LABOR AMID LABOR SHORTAGES IN JAPAN

### DINAMIKA TENAGA KERJA ASING DI TENGAH KEBUTUHAN TENAGA KERJA DI JEPANG

Viril Aydin Restanto<sup>1</sup>, Arsi Widiandari<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Bahasa dan Kebudayaan Jepang, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Diponegoro  
email: [viril2907@gmail.com](mailto:viril2907@gmail.com)

<sup>2</sup>Bahasa dan Kebudayaan Jepang, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Diponegoro  
email: [arsi@lecturer.undip.ac.id](mailto:arsi@lecturer.undip.ac.id)

#### **Abstract**

*This study analyzes social resistance within Japanese society toward foreign workers amid an accelerating demographic crisis marked by *shōshika* (declining birth rates) and *kōreika* (population aging). Although the Japanese government has expanded labor migration frameworks such as the Technical Intern Training Program (TITP) and the Specified Skilled Worker (SSW) scheme to mitigate structural labor shortages, societal acceptance has not advanced proportionally. Employing a qualitative descriptive approach, this research examines policy documents, scholarly literature, media reports, and official data to explore how ideological constructs—particularly *Nihonjinron*—shape public perceptions of migrant workers. The findings demonstrate that resistance manifests through misinformation, cultural stereotyping, and everyday exclusion, illustrated by two cases: the Africa Hometown 2025 controversy at the macro level and localized tensions involving Indian SSW workers. These cases expose an enduring tension between Japan's economic reliance on migrant labor and collective anxieties over cultural transformation. The study argues that such tensions function not merely as obstacles but as catalysts for gradual social change, encouraging local governments to reinforce *tabunka kyōsei* initiatives, expand multilingual services, and foster intercultural engagement. Ultimately, resistance constitutes an integral dimension of Japan's transition toward a more pluralistic and adaptive society.*

**Keywords:** Foreign Workers, Demographic Change, Social Resistance, *Nihonjinron*, Social Transformation

#### **Abstrak**

*Artikel ini mengeksplorasi potensi inovatif pembelajaran bahasa Jepang berbasis digital. Penelitian ini mengkaji resistensi sosial masyarakat Jepang terhadap tenaga kerja asing di tengah krisis demografi akibat *shōshika* dan *kōreika* yang memperparah kekurangan tenaga kerja struktural. Meskipun pemerintah Jepang memperluas skema migrasi seperti Technical Intern Training Program (TITP) dan Specified Skilled Worker (SSW) untuk memenuhi kebutuhan ekonomi nasional, penerimaan sosial tidak berkembang secara seimbang. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana ideologi *Nihonjinron* membentuk persepsi publik terhadap pekerja asing serta bagaimana resistensi tersebut merefleksikan dinamika perubahan sosial di Jepang. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis, data diperoleh melalui studi pustaka terhadap dokumen kebijakan, laporan media, literatur akademik, dan data resmi pemerintah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa resistensi*



muncul dalam bentuk misinformasi, stereotipe budaya, serta eksklusi dalam interaksi sehari-hari, sebagaimana terlihat pada polemik *Africa Hometown 2025* dan ketegangan sosial terhadap pekerja India dalam skema *SSW*. Fenomena ini memperlihatkan adanya ketegangan antara kebutuhan ekonomi dan kecemasan terhadap perubahan identitas budaya. Namun demikian, konflik tersebut juga mendorong penguatan kebijakan *tabunka kyōsei*, layanan multibahasa, dan ruang interaksi lintas budaya, sehingga resistensi menjadi bagian dari proses transisi menuju masyarakat Jepang yang lebih plural dan adaptif

**Kata kunci:** Tenaga Kerja Asing, Perubahan Demografi, Resistensi Sosial, *Nihonjinron*, Perubahan Sosial

## 1. PENDAHULUAN

Jepang saat ini menghadapi tantangan demografis yang serius akibat fenomena *shōshika* (penurunan angka kelahiran) dan *kōreika* (peningkatan populasi lanjut usia). Sejak dekade 1970-an, Jepang telah memasuki fase masyarakat menua dan kini dikategorikan sebagai *super aged society*, dengan lebih dari 28% penduduk berusia di atas 65 tahun pada tahun 2020 dan diproyeksikan terus meningkat pada dekade berikutnya (IPSS, 2023; Cabinet Office Japan, 2022). Perubahan struktur penduduk tersebut berdampak langsung pada menyusutnya populasi usia produktif, sehingga memunculkan kekhawatiran terhadap keberlanjutan ekonomi nasional. Penurunan jumlah penduduk secara keseluruhan yang diperkirakan terus berlanjut hingga pertengahan abad ini semakin memperkuat tekanan terhadap pasar tenaga kerja (Karo et al., 2021).

Krisis demografis tersebut telah memicu kekurangan tenaga kerja yang bersifat struktural di berbagai sektor seperti perawatan lansia, manufaktur, konstruksi, dan pertanian. Jones dan Yoon (2020) menjelaskan bahwa sektor-sektor tersebut mengalami gelombang pensiun massal tanpa regenerasi yang memadai. Laporan OECD (2024) juga menegaskan bahwa pemerintah Jepang merespons kondisi ini dengan memperluas kebijakan migrasi tenaga kerja melalui skema *Technical Intern Training Program (TITP)* dan *Specified Skilled Worker (SSW/Tokutei Ginō)*. Reformasi kebijakan pada tahun 2019 hingga 2024 menunjukkan pergeseran pendekatan Jepang dari model pelatihan jangka pendek menuju sistem yang lebih terstruktur dan berorientasi jangka panjang (Yamaguchi, 2025). Melalui skema *SSW*, pekerja asing diberikan peluang kerja lebih legal, durasi tinggal lebih panjang, serta kemungkinan reunifikasi keluarga dalam kategori tertentu (OECD, 2024).

Perubahan kebijakan migrasi Jepang dalam beberapa dekade terakhir juga menunjukkan pergeseran dari pendekatan yang sangat restriktif menuju model yang lebih pragmatis dalam menghadapi kekurangan tenaga kerja struktural. Studi Liu-Farrer dan Shire (2021) menunjukkan bahwa Jepang secara bertahap mengembangkan kerangka migrasi tenaga kerja yang lebih fleksibel seiring meningkatnya tekanan demografis dan kebutuhan ekonomi nasional. Seiring dengan perubahan kebijakan tersebut, jumlah pekerja asing di Jepang juga mengalami peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Data resmi menunjukkan bahwa jumlah pekerja migran terus bertambah seiring dengan perluasan skema penerimaan tenaga kerja asing di berbagai sektor industri (Immigration Services Agency of Japan, 2024). Peningkatan ini menunjukkan bahwa pekerja asing semakin menjadi bagian penting dalam struktur pasar tenaga kerja Jepang. OECD (2024) juga menegaskan bahwa migrasi tenaga kerja telah menjadi strategi penting bagi banyak negara



maju dalam menghadapi penurunan populasi usia produktif. Dalam konteks Jepang, peningkatan jumlah pekerja migran mencerminkan perubahan kebijakan negara yang semakin terbuka terhadap mobilitas tenaga kerja internasional.

Meskipun kebijakan tersebut dirancang untuk menjawab kebutuhan ekonomi, implementasinya tidak sepenuhnya berjalan tanpa hambatan. Yasuda (2022) mencatat bahwa pekerja asing masih menghadapi kendala bahasa dan keterbatasan mobilitas kerja. Liu-Farrer (2023) menambahkan bahwa proses integrasi sosial pekerja migran di Jepang sering kali terhambat oleh struktur sosial yang relatif tertutup. Di tingkat masyarakat, peningkatan jumlah pekerja asing juga menimbulkan respons yang beragam. Survei nasional menunjukkan sebagian masyarakat Jepang masih memiliki kekhawatiran terhadap dampak sosial dan budaya dari meningkatnya tenaga kerja asing (NHK Broadcasting Culture Research Institute, 2024). Bahkan, pemberitaan media mencatat munculnya resistensi dan demonstrasi terhadap kebijakan keterbukaan tenaga kerja asing di beberapa wilayah (The Asahi Shimbun, 2025). Kondisi ini menunjukkan adanya ketegangan antara kebutuhan ekonomi negara dan penerimaan sosial masyarakat.

Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa respons masyarakat terhadap pekerja asing di Jepang sering dipengaruhi oleh faktor sosial dan kultural selain pertimbangan ekonomi. Tsuda (2006) menjelaskan bahwa masyarakat Jepang memiliki kecenderungan mempertahankan identitas budaya yang dianggap homogen sehingga kehadiran warga asing sering dipersepsikan sebagai kelompok luar (*outsiders*). Burgess (2010) menambahkan bahwa stereotipe terhadap kelompok asing dapat memperkuat persepsi ancaman sosial meskipun tidak selalu didukung oleh data empiris. Sementara itu, Farrer (2011) menunjukkan bahwa interaksi antara masyarakat Jepang dan warga asing sering dibatasi oleh konstruksi sosial mengenai “perbedaan budaya”. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa isu tenaga kerja asing di Jepang tidak hanya berkaitan dengan kebijakan ekonomi, tetapi juga dengan dinamika identitas sosial dalam masyarakat.

Dalam konteks sosial-budaya, fenomena tersebut sering dikaitkan dengan ideologi *Nihonjinron* yang menekankan homogenitas etnis dan budaya Jepang. Lie (2001) menjelaskan bahwa wacana homogenitas telah lama membentuk identitas nasional Jepang modern. Sugimoto (2010) menilai bahwa ideologi ini memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap kelompok asing sebagai entitas yang berbeda secara kultural. Di tengah realitas demografis yang menuntut keterbukaan, pemerintah mulai memperkenalkan konsep *tabunka kyōsei* sebagai bentuk koeksistensi multikultural (Ishimatsu, 2025). Namun demikian, praktik sosial menunjukkan bahwa nilai homogenitas masih berperan dalam membentuk sikap masyarakat terhadap pekerja asing. Dalam perspektif teori konflik, situasi ini dapat dipahami sebagai pertentangan antara nilai dominan yang ingin mempertahankan struktur sosial lama dan realitas sosial baru yang semakin plural akibat migrasi tenaga kerja (Dahrendorf, 1958).

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas kebijakan tenaga kerja asing maupun dinamika homogenitas budaya di Jepang. Namun, sebagian besar penelitian tersebut berfokus pada aspek kebijakan, perlindungan hukum, atau integrasi ekonomi pekerja migran. Kajian yang secara spesifik menganalisis hubungan antara ideologi homogenitas dan respons sosial masyarakat Jepang terhadap pekerja asing dalam konteks kebutuhan tenaga kerja akibat krisis demografis masih relatif terbatas. Dengan kata lain, interaksi antara ideologi,

kebijakan migrasi, dan resistensi sosial belum banyak ditelaah dalam satu kerangka analisis yang komprehensif.

Berdasarkan penelitian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana respons dan resistensi sosial masyarakat Jepang terhadap pekerja asing terbentuk di tengah meningkatnya kebutuhan tenaga kerja akibat *shōshika* dan *kōreika*. Penelitian ini menekankan keterkaitan antara ideologi *Nihonjinron*, kebijakan migrasi tenaga kerja (TITP dan SSW), serta dinamika perubahan sosial yang muncul ketika kebutuhan ekonomi nasional berhadapan dengan nilai homogenitas budaya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dalam memahami transformasi sosial Jepang modern di tengah tekanan demografis dan globalisasi tenaga kerja.

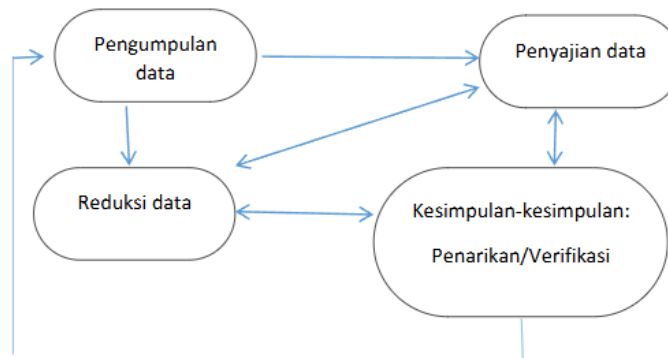
## 2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-analitis untuk mengkaji resistensi sosial masyarakat Jepang terhadap tenaga kerja asing dalam periode 2024–2025. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti membangun pemahaman yang komprehensif terhadap fenomena sosial berdasarkan data yang kaya dan kontekstual. Sebagaimana dijelaskan oleh Creswell dan Creswell (2022), penelitian kualitatif deskriptif bertujuan memahami fenomena berdasarkan pengalaman subjek, termasuk persepsi, perilaku, dan tindakan sosial. Nurrohman et al. (2024) menyatakan bahwa penelitian deskriptif-analitis tidak hanya menggambarkan fenomena, tetapi juga menganalisis permasalahan secara sistematis berdasarkan objek kajian. Dengan pertimbangan tersebut, pendekatan ini digunakan untuk memahami perubahan sosial dan respons masyarakat Jepang terhadap kehadiran pekerja asing.

Ruang lingkup penelitian difokuskan pada bentuk-bentuk resistensi sosial atau penolakan masyarakat Jepang terhadap tenaga kerja asing dalam konteks meningkatnya jumlah pekerja melalui skema *Specified Skilled Worker* (SSW/Tokutei Ginō). Subjek kajian mencakup dua kelompok sosial, yaitu pekerja asing yang bekerja di Jepang serta masyarakat Jepang yang memberikan respons terhadap keberadaan mereka. Kajian diarahkan pada dua kasus utama, yakni polemik *Africa Hometown* dan dinamika sosial terkait pekerja asal India di Jepang. Pemilihan kasus dilakukan secara purposif berdasarkan relevansi aktual, intensitas pemberitaan publik, serta keterkaitannya dengan kebijakan migrasi tenaga kerja. Dua kasus dipilih karena menyajikan dinamika resistensi sosial pada skala yang berbeda. Kasus *Africa Hometown* dipilih sebagai contoh pada tingkat makro karena polemik yang muncul memicu respons sosial yang luas di masyarakat Jepang, termasuk demonstrasi publik dan perdebatan mengenai kebijakan penerimaan pekerja asing. Isu tersebut memperoleh perhatian signifikan dalam pemberitaan media dan diskusi di ruang digital pada periode akhir tahun 2024 hingga 2025. Sementara itu, kasus interaksi sosial dengan pekerja asal India dipilih sebagai contoh pada tingkat mikro karena berkaitan dengan kerja sama bilateral Jepang–India dalam penyediaan tenaga kerja terampil, program tersebut menargetkan mobilitas hingga sekitar 500.000 orang dalam lima tahun, termasuk sekitar 50.000 pekerja terampil India yang diharapkan bekerja di Jepang untuk mengisi kekurangan tenaga kerja di sektor seperti teknologi informasi, manufaktur, dan kesehatan (The Times of India, 2026).

Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dengan menelaah sumber sekunder yang memiliki otoritas dan relevansi tematik. Sumber utama meliputi laporan Solidarity

Network with Migrants Japan (2023), pemberitaan NHK (2024), laporan OECD (2024), dan Japan Institute for Labour Policy and Training (JILPT, 2025). Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan literatur akademik yang membahas isu tenaga kerja asing, ideologi *Nihonjinron*, serta dinamika perubahan sosial di Jepang. Pemilihan sumber didasarkan pada kriteria kredibilitas institusional, aktualitas publikasi, serta kesesuaian dengan fokus penelitian, sehingga memungkinkan penelitian ini direplikasi pada periode dan kasus yang serupa.



**Gambar 2.1.** Proses Analisis Data Penelitian Kualitatif (Sumber: Rijali, 2018).

Prosedur analisis data mengikuti tahapan analisis kualitatif sebagaimana digambarkan dalam model interaktif (Rijali, 2018), yang terdiri atas pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Data yang telah dikumpulkan direduksi dengan menyeleksi informasi yang relevan dengan kategori resistensi sosial. Selanjutnya, data diklasifikasikan berdasarkan tema, disajikan dalam bentuk narasi analitis, kemudian diinterpretasikan dengan mengaitkan temuan empiris dengan kerangka teori. Tahapan ini dilakukan secara berulang hingga diperoleh konsistensi pola dan validitas interpretasi. Dengan prosedur tersebut, proses analisis dapat ditelusuri kembali secara sistematis apabila penelitian direplikasi oleh peneliti lain.

Secara teoretis, penelitian ini menggunakan teori konflik Karl Marx yang dikembangkan oleh Ralf Dahrendorf untuk menganalisis pertentangan nilai antara kebutuhan struktural tenaga kerja asing dan ideologi homogenitas Jepang (Dahrendorf, 1958). Kerangka ini digunakan untuk menjelaskan bagaimana konflik laten dalam interaksi sosial sehari-hari dapat mendorong perubahan sosial dalam masyarakat Jepang. Data tahun 2025 menunjukkan bahwa di sejumlah wilayah terjadi proses penyesuaian sosial ketika masyarakat mulai berinteraksi intens dengan pekerja asing di sektor pelayanan dan industri, meskipun sebagian kelompok masih menunjukkan pembatasan akses terhadap ruang tinggal dan ruang sosial. Dengan demikian, metode ini dipilih karena mampu menjelaskan dinamika sosial-kultural yang tidak dapat diukur secara statistik, tetapi memerlukan analisis interpretatif berbasis dokumen, kebijakan, dan data sosial yang relevan.

### 3. PEMBAHASAN DAN DISKUSI



Penelitian ini menemukan bahwa resistensi masyarakat Jepang terhadap pekerja asing tidak muncul secara tunggal, melainkan melalui beberapa bentuk respons sosial seperti kekhawatiran budaya, stereotipe terhadap kelompok asing, serta pembatasan interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan analisis dokumen, laporan media, dan literatur ilmiah, resistensi tersebut muncul baik pada tingkat makro melalui polemik kebijakan maupun pada tingkat mikro melalui interaksi sosial antara masyarakat lokal dan pekerja asing. Dua kasus yang dianalisis dalam penelitian ini adalah polemik *Africa Hometown 2025* dan dinamika interaksi sosial dengan pekerja India dalam skema SSW, yang menunjukkan bagaimana kebutuhan tenaga kerja asing seringkali berhadapan dengan norma sosial masyarakat Jepang yang masih dipengaruhi oleh ideologi homogenitas. Laporan internasional juga menunjukkan bahwa kebutuhan tenaga kerja asing di Jepang tidak hanya berkaitan dengan sektor tertentu, tetapi telah menjadi bagian dari strategi ekonomi jangka panjang untuk menjaga produktivitas nasional. OECD (2024) menegaskan bahwa migrasi tenaga kerja semakin dipandang sebagai instrumen penting dalam mengatasi penurunan populasi usia kerja di negara-negara maju, termasuk Jepang.

### **Resistensi Sosial terhadap Tenaga Kerja Asing**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa resistensi masyarakat Jepang terhadap pekerja asing dipengaruhi oleh beberapa faktor sosial dan kultural, seperti kecemasan terhadap perubahan budaya, persepsi keamanan, serta stereotipe terhadap kelompok pendatang. Tsuda (2006) menjelaskan bahwa masyarakat Jepang memiliki kecenderungan mempertahankan identitas budaya yang dianggap homogen, sehingga kehadiran warga asing sering dipersepsikan sebagai ancaman terhadap stabilitas sosial yang telah terbentuk. Temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa persepsi keamanan sering menjadi dasar munculnya resistensi. Burgess (2010) menyebutkan bahwa sebagian masyarakat mengaitkan kehadiran orang asing dengan potensi gangguan sosial, meskipun data empiris tidak selalu mendukung asumsi tersebut.

Selain itu, stereotipe budaya turut memperkuat jarak sosial antara masyarakat lokal dan pekerja asing. Perbedaan gaya komunikasi, kebiasaan hidup, serta praktik budaya seringkali dipersepsikan sebagai bentuk ketidaksesuaian dengan norma sosial Jepang. Kondisi ini sejalan dengan temuan Farrer (2011) yang menunjukkan bahwa interaksi antara masyarakat Jepang dan warga asing sering dibatasi oleh konstruksi sosial mengenai “perbedaan budaya”. Dengan demikian, resistensi yang muncul tidak hanya bersifat emosional, tetapi juga merupakan mekanisme sosial untuk mempertahankan batas identitas budaya dalam masyarakat yang secara historis menekankan homogenitas.

Temuan penelitian ini juga diperkuat oleh hasil survei opini publik yang menunjukkan adanya ambivalensi dalam sikap masyarakat Jepang terhadap pekerja asing. Data resmi pemerintah Jepang juga menunjukkan peningkatan signifikan jumlah pekerja asing dalam beberapa tahun terakhir. Immigration Services Agency of Japan (2024) mencatat bahwa jumlah pekerja migran terus meningkat seiring perluasan skema *Specified Skilled Worker* (SSW) yang ditujukan untuk mengisi kekurangan tenaga kerja di berbagai sektor industri. Survei NHK Broadcasting Culture Research Institute (2024) menunjukkan bahwa sekitar 70% responden setuju bahwa Jepang membutuhkan tenaga kerja asing, namun angka tersebut menurun menjadi sekitar 57% ketika responden ditanya mengenai penerimaan



pekerja asing di lingkungan tempat tinggal mereka. Hasil serupa juga ditemukan dalam survei Japan Center for International Exchange yang menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih mengaitkan peningkatan jumlah pekerja asing dengan potensi gangguan keamanan (Okumura, 2024).

Fenomena tersebut dapat dianalisis lebih lanjut menggunakan perspektif teori konflik yang dikemukakan oleh Karl Marx. Menurut Marx, konflik sosial muncul ketika terjadi pertentangan kepentingan antara kelompok-kelompok dalam masyarakat yang dipengaruhi oleh perubahan dalam struktur ekonomi dan sosial. Dalam konteks Jepang, kebutuhan negara terhadap tenaga kerja asing semakin meningkat akibat krisis demografi dan berkurangnya jumlah tenaga kerja usia produktif. Namun, bagi sebagian masyarakat lokal, masuknya pekerja asing dapat menimbulkan kekhawatiran terkait perubahan sosial, identitas budaya, maupun persaingan dalam akses terhadap pekerjaan dan sumber daya sosial. Kondisi ini menunjukkan adanya ketegangan antara kepentingan ekonomi negara yang membutuhkan tenaga kerja asing dengan persepsi sebagian masyarakat yang masih mempertahankan nilai homogenitas budaya. Dengan demikian, resistensi masyarakat terhadap pekerja asing tidak hanya disebabkan oleh perbedaan budaya, tetapi juga dapat dipahami sebagai bentuk respon terhadap perubahan struktur ekonomi dan sosial yang terjadi dalam masyarakat Jepang. Temuan ini menunjukkan bahwa masyarakat Jepang pada dasarnya menyadari kebutuhan ekonomi terhadap pekerja asing, tetapi masih memiliki batas toleransi tertentu terhadap kehadiran mereka dalam kehidupan sehari-hari.

### **Polemik Africa Hometown 2025**

Kasus Africa Hometown 2025 menunjukkan bagaimana misinformasi dapat memicu resistensi sosial terhadap pekerja asing di Jepang. Hasil analisis dokumen menunjukkan bahwa polemik ini berawal dari penyebaran informasi yang tidak sepenuhnya akurat mengenai program kerja sama yang sebenarnya hanya bersifat pelatihan vokasional jangka pendek. Namun, di ruang publik berkembang narasi bahwa pemerintah berencana menempatkan warga Afrika secara permanen di wilayah pedesaan Jepang. Penyebaran informasi tersebut memicu kekhawatiran masyarakat lokal terhadap perubahan komposisi sosial di wilayah mereka.



**Gambar 3.1.** JICA Networking Seminar for African Participants  
(Sumber: JICA, 2023)



Fenomena ini sejalan dengan temuan Tandoc et al. (2022) yang menjelaskan bahwa misinformasi dalam masyarakat yang relatif homogen dapat menghasilkan *collective misperception* dan memicu ketegangan sosial. Peran media digital juga memperkuat penyebaran informasi tersebut karena algoritma media sosial cenderung mempromosikan konten yang memicu emosi atau kecemasan (Fuchs, 2021). Dalam konteks masyarakat pedesaan yang memiliki tingkat interaksi terbatas dengan kelompok asing, misinformasi tersebut menjadi lebih mudah dipercaya dan memperbesar persepsi ancaman terhadap perubahan sosial.

Resistensi masyarakat kemudian muncul dalam bentuk petisi warga, pernyataan penolakan komunitas lokal, serta tekanan terhadap pemerintah daerah untuk meninjau kembali program tersebut. Hirai (2024) menjelaskan bahwa ketidakhadiran mekanisme konsultasi publik dalam kebijakan migrasi sering memperbesar ketegangan antara pemerintah pusat dan masyarakat daerah. Dengan demikian, konflik yang terjadi dalam polemik *Africa Hometown* tidak hanya berkaitan dengan substansi program, tetapi juga dengan proses komunikasi kebijakan yang dianggap kurang melibatkan masyarakat lokal.

Selain itu, fenomena resistensi tersebut juga dapat dipahami dalam kaitannya dengan ideologi *Nihonjinron*. Ideologi ini menekankan pandangan bahwa masyarakat Jepang merupakan masyarakat yang homogen secara budaya, bahasa, dan etnis. Dalam perspektif ini, keberadaan kelompok asing sering dipandang sebagai sesuatu yang berada di luar identitas sosial masyarakat Jepang. Oleh karena itu, ketika kebijakan pemerintah membuka peluang lebih besar bagi masuknya pekerja asing, sebagian masyarakat merespons dengan kekhawatiran terhadap kemungkinan perubahan dalam struktur sosial dan identitas budaya lokal. Dalam kerangka teori konflik Marx yang dikembangkan oleh Dahrendorf, ideologi *Nihonjinron* dapat dipahami sebagai nilai yang digunakan oleh kelompok dominan untuk mempertahankan tatanan sosial yang sudah ada. Dengan demikian, resistensi terhadap program seperti *Africa Hometown* tidak hanya berkaitan dengan aspek kebijakan atau ekonomi, tetapi juga dipengaruhi oleh cara pandang masyarakat terhadap identitas nasional dan batas-batas sosial antara masyarakat lokal dan kelompok pendatang.

### **Interaksi Sosial dengan Pekerja India (SSW)**

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa resistensi sosial terhadap pekerja asing tidak hanya muncul dalam bentuk konflik kebijakan, tetapi juga terlihat dalam interaksi sosial sehari-hari di tingkat komunitas. Kasus pekerja India yang bekerja di Jepang melalui skema Specified Skilled Worker (SSW) menunjukkan bagaimana kehadiran kelompok minoritas baru dapat memunculkan dinamika adaptasi budaya antara masyarakat lokal dan pekerja migran.

Pekerja India memiliki peran penting dalam sektor teknologi informasi di Jepang yang saat ini mengalami kekurangan tenaga kerja akibat percepatan transformasi digital. Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri Jepang memproyeksikan bahwa Jepang akan mengalami kekurangan sekitar 790.000 tenaga kerja di sektor I.T pada tahun 2030 jika kebutuhan digitalisasi tidak diimbangi dengan pasokan tenaga kerja yang memadai. Dalam konteks ini, pekerja India menjadi salah satu kelompok profesional yang signifikan karena reputasi India sebagai salah satu negara dengan tenaga kerja I.T terbesar di dunia.

Namun, temuan penelitian menunjukkan bahwa interaksi sosial antara pekerja India dan masyarakat lokal seringkali diwarnai oleh kesalahpahaman budaya. Beberapa laporan media menunjukkan adanya penolakan terhadap pekerja India dalam proses penyewaan apartemen, terutama di wilayah pinggiran kota (NHK, 2024). Penolakan tersebut biasanya didasarkan pada kekhawatiran mengenai perbedaan kebiasaan hidup dan hambatan komunikasi. Harada (2023) menjelaskan bahwa diskriminasi perumahan terhadap warga asing masih menjadi masalah yang signifikan di Jepang karena adanya ketidakpastian yang dirasakan pemilik properti terhadap perbedaan budaya.

Selain itu, konflik sosial juga muncul dari perbedaan kebiasaan budaya dalam kehidupan sehari-hari, seperti praktik memasak, pola makan vegetarian, atau kebiasaan ibadah. Kawakami (2021) mencatat bahwa kesalahpahaman budaya sering muncul karena kurangnya pengetahuan masyarakat lokal terhadap praktik budaya kelompok asing. Pettigrew (1998) menjelaskan bahwa interaksi antarbudaya yang tidak disertai pemahaman yang memadai dapat menghasilkan prasangka dan interpretasi yang keliru terhadap kelompok lain.

Meskipun konflik yang muncul relatif kecil dibandingkan polemik *Africa Hometown*, kasus pekerja India menunjukkan bahwa resistensi sosial dapat muncul dalam bentuk konflik mikro di tingkat komunitas. Menurut Dahrendorf (1971), konflik sosial tidak selalu muncul dalam bentuk konflik terbuka, tetapi seringkali hadir sebagai *latent conflict* yang tercermin dalam ketegangan kecil dalam interaksi sosial sehari-hari. Dalam konteks ini, interaksi antara pekerja India dan masyarakat lokal dapat dipahami sebagai indikator awal perubahan sosial yang sedang berlangsung di Jepang.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa resistensi terhadap pekerja asing di Jepang terjadi melalui berbagai bentuk, mulai dari polemik kebijakan di tingkat nasional hingga konflik sosial kecil dalam kehidupan sehari-hari. Fenomena tersebut menunjukkan adanya ketegangan antara kebutuhan ekonomi Jepang terhadap tenaga kerja asing dan norma sosial masyarakat yang masih dipengaruhi oleh ideologi homogenitas. Namun, resistensi tersebut juga dapat dipahami sebagai bagian dari proses perubahan sosial yang secara bertahap mendorong masyarakat Jepang untuk menyesuaikan diri dengan realitas sosial yang semakin beragam.

#### 4. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa resistensi masyarakat Jepang terhadap pekerja asing muncul sebagai respons sosial terhadap ketegangan antara kebutuhan ekonomi akibat kekurangan tenaga kerja dan nilai budaya yang masih dipengaruhi oleh ideologi homogenitas. Melalui analisis dua studi kasus, yaitu polemik *Africa Hometown 2025* dan interaksi sosial dengan pekerja India dalam skema *Specified Skilled Worker (SSW)*, ditemukan bahwa bentuk resistensi tidak selalu muncul dalam konflik terbuka, tetapi juga dalam bentuk misinformasi, stereotipe budaya, serta pembatasan interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari. Temuan ini memperlihatkan bahwa meskipun Jepang secara struktural membutuhkan tenaga kerja asing untuk menjaga stabilitas ekonomi di tengah krisis demografi, penerimaan sosial masyarakat belum sepenuhnya berkembang seiring dengan kebijakan tersebut. Dengan demikian, resistensi terhadap pekerja asing tidak hanya



mencerminkan penolakan sosial, tetapi juga menunjukkan adanya proses negosiasi nilai antara kebutuhan ekonomi dan identitas budaya dalam masyarakat Jepang modern.

Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa konflik sosial yang muncul akibat kehadiran pekerja asing dapat dipahami sebagai bagian dari proses transformasi sosial menuju masyarakat yang lebih plural. Dalam perspektif teori konflik, ketegangan antara masyarakat lokal dan pekerja migran mencerminkan dinamika perubahan struktur sosial yang terjadi secara bertahap melalui interaksi sehari-hari di tingkat komunitas. Oleh karena itu, penguatan kebijakan integrasi sosial seperti program *tabunka kyōsei*, penyediaan layanan publik multibahasa, serta peningkatan ruang interaksi lintas budaya menjadi langkah penting untuk mengurangi resistensi sosial dan meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap keberagaman. Penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya kajian mengenai hubungan antara ideologi homogenitas, kebijakan migrasi tenaga kerja, dan perubahan sosial di Jepang, sekaligus memberikan pemahaman bahwa adaptasi sosial terhadap pekerja asing merupakan bagian dari proses transisi Jepang menuju masyarakat yang lebih terbuka dalam menghadapi tekanan demografis dan globalisasi tenaga kerja.

## 5. REFERENSI

- Burgess, C. (2010). The “Illusion” of Homogeneous Japan and National Character: Discourse as A Tool to Transcend the “Myth” vs “Reality” Binary. *The Asia-Pacific Journal*, 8(9), 1-16.
- Cabinet Office Japan. (2022). Annual report on the ageing society 2022. Cabinet Office, Government of Japan.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2022). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (6th ed.). Sage Publications.
- Dahrendorf, R. (1958). Toward a theory of social conflict. *Journal of Conflict Resolution*, 2(2), 170–183.
- Dahrendorf, R. (1971). *Society and democracy in Germany*. Doubleday.
- Farrer, J. (2011). Global nightscapes in Shanghai as ethnosexual contact zones. *Journal of Ethnic and Migration Studies*, 37(5), 747–764.
- Fuchs, C. (2021). *Social media: A critical introduction* (3rd ed.). Sage Publications.
- Harada, T. (2023). Housing discrimination against foreign residents in Japan. *Asian and Pacific Migration Journal*, 32(2), 213–230.
- Hirai, T. (2024). Migration governance and local community responses in rural Japan. *Social Science Japan Journal*, 27(1), 88–104.
- Immigration Services Agency of Japan. (2024). *Immigration control and residency management report*. Government of Japan.
- IPSS. (2023). *Population projections for Japan*. National Institute of Population and Social Security Research.
- Ishimatsu, Y. (2025). Multicultural coexistence policies in contemporary Japan. *Japanese Journal of Political Science*, 26(1), 45–62.
- Jones, R., & Yoon, J. (2020). Japan labour market under demographic decline. OECD Economics Department Working Papers.
- Karo, M., et al. (2021). Demographic transition and labour market change in Japan. *Asian Population Studies*, 17(3), 321–337.

- Kawakami, T. (2021). Cultural misunderstanding and migrant integration in Japan. *International Journal of Japanese Sociology*, 30(1), 55–70.
- Liu-Farrer, G. (2023). *Immigrant Japan: Mobility and belonging in an ethnically homogeneous nation*. Cornell University Press.
- NHK Broadcasting Culture Research Institute. (2024). *Public opinion survey on foreign workers in Japan*. NHK.
- Nurrohman, A., et al. (2024). Descriptive analytical methods in social research. *Journal of Social Research Methodology*, 12(2), 155–168.
- OECD. (2024). *International migration outlook 2024*. Organisation for Economic Co-operation and Development.
- Okumura, K. (2024). *Public perception of foreign workers in Japan*. Japan Center for International Exchange Report.
- Pettigrew, T. F. (1998). Intergroup contact theory. *Annual Review of Psychology*, 49, 65–85.
- Rijali, A. (2018). Analisis data kualitatif. *Jurnal Alhadharah*, 17(33), 81–95.
- Sugimoto, Y. (2010). *An introduction to Japanese society* (3rd ed.). Cambridge University Press.
- Tandoc, E. C., Lim, Z. W., & Ling, R. (2022). Defining fake news. *Digital Journalism*, 10(1), 1–17.
- The Asahi Shimbun. (2025). *Public debate on foreign labour policy in Japan*. The Asahi Shimbun.
- The Times of India. (2026). *Hokkaido and Maharashtra to boost human resource exchange*.
- Tsuda, T. (2006). *Local citizenship in recent countries of immigration*. Lexington Books.
- Yamaguchi, K. (2025). Labour migration reform and the specified skilled worker program in Japan. *Journal of International Migration and Integration*, 26(1), 45–63.
- Yasuda, K. (2022). Skilled migration policy and labour integration in Japan. *Asian and Pacific Migration Journal*, 31(3), 350–368.